

saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 15 tahun dan sudah memiliki 257 Unit Layanan *Baitul Māl wat Tamwīl*/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. Dan kini sudah mencapai 26 Kantor pelayanan BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Indonesia diantaranya: Bali, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, DKI Jakarta, Gresik, Jawa Barat, Jember, Jombang, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kediri, Kotamadya Surabaya, Lampung, Lumajang, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Riau, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep.

Salah satu Unit Layanan *Baitul Māl wat Tamwīl*/Jasa Keuangan Syariah yang ada di Sidoarjo adalah BMT Yang beralamatkan di Perumahan Larangan Mega Asri No. 01 Blok E Candi-Sidoarjo yang didirikan pada tanggal 24 April 2011 dan diresmikan pada tanggal 25 April 2011, dan sudah ditetapkan sebagai kantor cabang wilayah Sidoarjo yang meliputi wilayah capem sekitarnya seperti Tanggulangin, Krian, Waru, Tulangan, dan Sepanjang.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter

- 9) Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
 - 10) Memastikan semua SOM (standar operasional manajemen) dan SOP (standar operasional prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
 - 11) Mengendalikan likuiditas.
 - 12) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaanya secara kontinyu kepada manajerial.
 - 13) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.
 - 14) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaanya minimal 1 bulan sekali.
2. Wakil Kepala Cabang
- 1) Menjadi kepala operasional di kantor cabang.
 - 2) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantornya.
 - 3) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
 - 5) Mengendalikan likuiditas di kantornya.
 - 6) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.

Dalam skema diatas menerangkan suatu produk akad pembiayaan *murābahah* yang disertai dengan akad *wakālah*, tetapi pada praktiknya operasional akad pembiayaan *murābahah* dijalankan secara bersamaan dengan akad *wakālah*.

Pada contoh kasus di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo pernah ada suatu pengajuan pembiayaan dari pihak anggota yang berniat untuk merenovasi rumah dimana pihak anggota ini menggunakan suatu produk pembiayaan multi griya barakah, pihak anggota mengajukan pembiayaan MGB ini sejumlah 10.000.000 kepada pihak BMT dengan kesepakatan di akad tertulis *murābahah bil wakālah* ada kewajiban penyerahan bukti pembelian barang (bukti kwitansi) dari pihak anggota setelah membeli barang.

Contoh kasus yang terjadi pada seorang anggota X mengajukan suatu pembiayaan untuk merenovasi rumah, yakni dalam hal ini termasuk dalam kategori pembiayaan MGB (Multi Griya Barokah) yaitu suatu pembiayaan yang ditujukan untuk pembangunan atau perenovasian rumah, dalam pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *murābahah bil wakālah* , dimana dalam pengoprasionalan akadnya pihak anggota mengajukan sejumlah pembiayaan yang diinginkan untuk perenovasian rumah, kemudian pihak BMT menyetujui maksud dari pengajuan pembiayaan yang diinginkan oleh pihak anggot si X ini sehingga dilakukan adanya sebuah kesepakatan akad *murābahah* diawal disertai dengan adanya akad *wakālah* yang

ditujukan agar pihak anggota si X ini bisa membeli barang yang dimaksud untuk dibeli sendiri hal ini dikarenakan keterbatasan pihak BMT dalam memenuhi kebutuhan barang yang dimaksud, dalam hal ini maka pihak BMT berperan sebagai *muwakkil* sebagai pemberi kuasa kepada pihak anggota si X sebagai *wakil* atau penerima kuasa dari BMT untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan anggota.

Dalam hal pembelian barang, BMT juga mensyaratkan adanya bukti pembelian barang dari anggota, dimana ketika bukti pembelian barang yang dimaksud terjadi selisih harga dengan jumlah pengajuan pembiayaan diawal akad tadi, sehingga pihak anggota yang mengajukan pembiayaan tadi masih mempunyai kelebihan sisa dari jumlah pembiayaan sebelumnya, akan tetapi sisanya tidak dikembalikan oleh pihak anggota, karena jumlah yang terdapat dalam ketentuan pembiayaan sebelumnya sudah tercatat dalam akad tertulis sebelumnya.⁵

⁵ Zainuddin Abbas (Wakil Kepala Cabang BMT UGT Sidogri KC. Larangan Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 November 2015.